

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Air yang layak konsumsi adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat dan memiliki peranan signifikan dalam aspek sosial, kesehatan, dan aktivitas ekonomi di desa. Di Desa Tukad Mungga, pengelolaan air minum dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ini adalah upaya desa untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki demi memperbaiki kesejahteraan warga serta mencapai kemandirian desa. Diharapkan pengelolaan penyediaan air oleh BUMDes dapat memastikan ketersediaan yang terus-menerus serta membantu meningkatkan pendapatan desa.

Dalam situasi ini, keberhasilan administrasi tidak hanya dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya fisik dan dana, tetapi juga oleh mutu pengelolaan internal lembaga, yang mengatur keseluruhan rangkaian mulai dari perencanaan dan pelaksanaan sampai penilaian kegiatan usaha. Ketersediaan sarana dan prasarana seperti jaringan pipa, sumber mata air, serta dukungan modal memang menjadi faktor penting dalam menunjang operasional layanan air bersih. Namun, tanpa pengelolaan yang teratur, pembagian tugas yang terdefinisi dengan baik, kepemimpinan yang handal, serta sistem pengawasan dan kontrol yang efisien, sumber daya ini tidak akan bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, kualitas manajemen internal juga tercermin dari kemampuan pengelola dalam membangun komunikasi yang baik antaranggota organisasi maupun dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pengambilan keputusan

yang partisipatif, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta responsivitas terhadap keluhan pelanggan menjadi indikator penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Dengan demikian, keberhasilan dalam pengelolaan usaha air di desa sangat dipengaruhi oleh kerja sama antara ketersediaan sumber daya dan kemampuan manajemen yang profesional, bertanggung jawab, serta fokus pada pelayanan publik yang berkelanjutan.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sujana dan Suwendra (2023) mengungkapkan bahwa dorongan dan interaksi memiliki dampak baik yang signifikan pada prestasi kerja karyawan BUMDes dan memberikan kontribusi sebesar 64,2% dalam perbaikan kinerja. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan suatu unit usaha desa sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan internal organisasi, terutama dalam aspek manajemen sumber daya manusia dan efektivitas komunikasi antara pengelola dan pemangku kepentingan

Sejalan dengan hasil ini, penelitian yang dikerjakan oleh Dewi dan Suwena (2022) mengungkapkan bahwa pandangan, pemahaman, dan data memberikan sumbangan yang baik dan berarti terhadap keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program kerja BUMDes. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat bertambah seiring dengan semakin baiknya pandangan masyarakat terhadap BUMDes, serta peningkatan pemahaman mengenai program yang dijalankan dan semakin terbukanya akses terhadap informasi yang disediakan.

Namun, dalam implementasinya, pengelolaan usaha air desa oleh BUMDes di Desa Tukad Mungga masih mengalami sejumlah masalah. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah tingginya jumlah utang pembayaran iuran air dari para pelanggan. Kondisi ini berdampak langsung pada terhambatnya arus kas BUMDes,

sehingga memengaruhi kemampuan pengelola dalam menjalankan operasional, melakukan pemeliharaan jaringan air, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Permasalahan tunggakan pembayaran air tersebut juga berkaitan dengan belum optimalnya strategi penagihan yang diterapkan oleh BUMDes. Mekanisme penagihan yang belum terstandar, baik dari segi jadwal, penerapan sanksi, maupun pendekatan persuasif kepada pelanggan, menyebabkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran air tepat waktu masih rendah.

Selain itu, kekurangan tenaga kerja dalam pengelolaan bisnis air di desa, baik dari aspek manajerial, administrasi, maupun teknis, turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan strategi pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes.

Kesadaran dan keterlibatan sejumlah penduduk mengenai keberlanjutan pasokan air di desa juga perlu diperbaiki. Banyak orang yang belum sepenuhnya menyadari bahwa membayar tagihan air secara tepat waktu adalah suatu bentuk tanggung jawab bersama untuk menjamin penyediaan air minum yang berkelanjutan. Ketidakhahaman ini tidak hanya mengakibatkan meningkatnya tunggakan pembayaran, tetapi juga mengancam keberlanjutan pasokan air desa yang dikelola oleh BUMDes.

Selain masalah tagihan air yang belum dilunasi, BUMDes yang mengurus layanan air di Tukad Mungga juga mengalami kekurangan tenaga kerja. Anggota BUMDes masih kurang memiliki kemampuan dalam manajemen, administrasi, dan teknis yang dibutuhkan untuk mengoperasikan utilitas air desa tersebut. Keterbatasan tersebut terlihat pada perencanaan usaha yang belum optimal, pengelolaan administrasi dan keuangan yang masih sederhana, serta kemampuan teknis dalam pemeliharaan dan pengelolaan sarana prasarana air bersih yang belum

se penuhnya memadai. Situasi minimnya tenaga kerja ini secara langsung memengaruhi efisiensi pengelolaan usaha air di desa, termasuk dalam penyusunan strategi penagihan, pengawasan penggunaan air, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Apabila kapasitas pengelola BUMDes tidak didukung oleh kemampuan yang memadai dan penguatan kompetensi secara berkelanjutan, maka pengelolaan usaha air desa berpotensi berjalan kurang maksimal dan sulit mencapai tujuan sebagai sumber pelayanan publik sekaligus penggerak ekonomi desa. Karena itu, peningkatan kemampuan manusia menjadi faktor krusial untuk kesuksesan strategi pengelolaan pasokan air di desa.

Di Desa Tukad Mungga, pengelolaan fasilitas air di desa masih mengalami kendala terkait kurangnya sumber daya manusia, terutama dalam aspek manajemen, administrasi, dan keterampilan teknis. Para pegawai BUMDes (Biro Usaha Milik Desa) belum sepenuhnya menguasai kemampuan yang dibutuhkan untuk merancang, mengatur, dan mengelola operasional fasilitas air di desa dengan cara yang profesional dan berkelanjutan. Keterbatasan kemampuan administrasi dan manajerial tersebut berdampak pada belum optimalnya pengelolaan keuangan, pencatatan penggunaan air, serta pengawasan terhadap pembayaran iuran pelanggan. Selain itu, keterbatasan kemampuan teknis pengelola dalam pemeliharaan dan perbaikan jaringan air bersih juga berpotensi menimbulkan gangguan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan usaha air desa belum berjalan secara maksimal, sehingga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, efisiensi operasional, serta keberlanjutan usaha air desa yang dikelola oleh BUMDes di Desa Tukad Mungga.

Mutiara, M. dan timnya (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan dalam manajemen usaha desa tidak semata-mata bergantung pada keberadaan sumber daya alam, namun juga sangat dipengaruhi oleh cara pengelolaan lembaga, kemampuan sumber daya manusia, serta keterlibatan komunitas desa. Dalam praktiknya, berbagai permasalahan sering muncul, seperti lemahnya manajemen pengelolaan, keterbatasan kemampuan pengelola, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung keberlanjutan usaha desa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam pengelolaan usaha, termasuk munculnya permasalahan tunggakan pembayaran dalam usaha air desa. serta rendahnya partisipasi masyarakat sebagaimana terjadi pada pengelolaan usaha air desa di Desa Tukad Mungga yang mencerminkan pentingnya penerapan strategi pengelolaan usaha desa yang lebih profesional, partisipatif, dan berkelanjutan. Ini sejalan dengan pendapat Mutiara dan koleganya (2023) bahwa BUMDes seharusnya diurus tidak hanya sebagai entitas ekonomi tetapi juga sebagai lembaga sosial-ekonomi di desa, yang membutuhkan penerapan manajemen yang baik dan keterlibatan aktif dari masyarakat desa.

Pengelolaan sumber daya oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di tingkat desa telah menjadi hal yang sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dengan semakin banyaknya tantangan dalam pelayanan publik. Saat ini, UKM diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penyedia layanan, tetapi juga menjadi penggerak dalam mencapai kemandirian ekonomi di desa. Dengan demikian, peningkatan performa UKM, termasuk dalam aspek pengelolaan pasokan air minum, adalah sebuah isu penting yang memerlukan perhatian yang mendalam.

Ramadhan (2022) mendefinisikan pengelolaan sebagai suatu proses yang melibatkan inovasi dan kemampuan menciptakan nilai baru, di mana pengelola adalah individu atau organisasi yang mampu mengidentifikasi peluang dan membangun sistem untuk memanfaatkannya. Dalam konteks pengelolaan air bersih desa, hal ini berarti BUMDes perlu mengembangkan strategi efektif untuk mengatasi hambatan seperti tunggakan pembayaran air yang dapat mengganggu keberlanjutan layanan. Sementara itu, menurut Pramudita (2025) pengelola yang baik adalah pihak yang memiliki keberanian mengambil langkah tegas dalam menghadapi permasalahan, termasuk mencari solusi terhadap tunggakan pembayaran dari pelanggan. Keberanian ini penting agar BUMDes mampu meminimalkan risiko keuangan dan tetap menjaga kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat.

Permasalahan tunggakan pembayaran air desa adalah kondisi di mana sebagian pengguna layanan air bersih yang dikelola oleh BUMDes tidak melakukan pembayaran tepat waktu atau bahkan menunggak dalam jangka waktu tertentu. Tunggakan ini mencerminkan adanya hambatan dalam pengelolaan keuangan unit usaha air bersih desa, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi masyarakat, kesadaran akan kewajiban membayar, efektivitas penagihan, serta sistem administrasi BUMDes itu sendiri. Hanum (2019).

Permasalahan finansial yang dihadapi oleh unit usaha BUMDes tidak terlepas dari risiko adanya kredit yang bermasalah serta keterlambatan pembayaran. Studi yang dilakukan oleh Adnyana dan Dharmayasa (2025) mengindikasikan bahwa aspek suku bunga pinjaman, durasi pinjaman, dan keadaan ekonomi memberikan

dampak pada munculnya kredit bermasalah di BUMDes. Hal ini menegaskan bahwa kondisi ekonomi masyarakat serta kebijakan pengelolaan yang diterapkan oleh BUMDes sangat menentukan tingkat kelancaran pembayaran kewajiban oleh masyarakat.

Masalah terkait pembayaran tagihan air yang tertunda di desa-desa ditentukan oleh dua jenis faktor: yang berasal dari dalam dan luar. Faktor dari dalam mencakup kesadaran serta disiplin setiap individu dalam menyelesaikan pembayaran mereka, sementara faktor dari luar berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga dan konteks sosial yang berdampak pada cara mereka membayar. Dalam beberapa tahun terakhir, BUMDes (unit usaha pengelolaan air dan rumah tangga desa) diharapkan, sebagai alat ekonomi desa, tidak hanya dapat beroperasi dengan baik secara finansial tetapi juga memberikan layanan publik, termasuk pengelolaan pasokan air bersih di desa. Namun, kejadian yang terlihat di banyak desa menunjukkan bahwa pengelolaan usaha air oleh BUMDes masih menghadapi sejumlah masalah yang bersifat struktural dan operasional, yang secara langsung mempengaruhi kelangsungan usaha serta mutu layanan kepada masyarakat.

Salah satu fenomena yang sering muncul adalah tingginya tingkat tunggakan pembayaran air oleh pelanggan desa. Masyarakat sebagai pengguna layanan air bersih belum sepenuhnya memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, meskipun air bersih merupakan kebutuhan dasar yang digunakan setiap hari. Kondisi ini menyebabkan arus kas BUMDes terganggu, sehingga BUMDes mengalami kesulitan dalam melakukan pemeliharaan jaringan pipa, perbaikan instalasi, hingga pembayaran biaya operasional seperti listrik pompa dan honor petugas.

Menurut Sartika (2022), adanya dana operasional yang dikelola dengan baik berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyediaan layanan air bersih di desa. Hal ini disebabkan karena untuk menjaga keberlangsungan layanan air, BUMDes memerlukan aliran dana yang stabil, yang salah satunya berasal dari pembayaran tepat waktu oleh pelanggan. Dengan kata lain, sebelum melakukan pemeliharaan atau pengembangan jaringan air, BUMDes harus memastikan pendapatan dari iuran pelanggan mencukupi kebutuhan operasi. Faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat tunggakan adalah inovasi dan keterampilan manajerial dalam sistem penagihan. Yasir Aulia (2024) mendefinisikan kreativitas sebagai keterampilan untuk menciptakan ide atau rencana inovatif yang mampu menyelesaikan persoalan yang ada. Dalam konteks BUMDes, kreativitas dapat berupa inovasi metode penagihan, pemberian insentif bagi pelanggan yang membayar tepat waktu, atau penggunaan teknologi digital untuk mempermudah proses pembayarannya. Dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Jumlah Penduduk Desa Tukad Mungga

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk Desa (jiwa)
1	Laki Laki	2.598
2	Perempuan	2.509
3	Jumlah Kepala Keluarga	1.602
	Jumlah Keseluruhan Penduduk Desa	5.107

Sumber: Badan Usaha Milik Desa Per 8 April 2025

Berdasarkan Table data 1.1 yang diperoleh, jumlah penduduk Desa Tukad mungga mencapai 4.325 jiwa dengan 1.078 kepala keluarga yang terdaftar sebagai pelanggan layanan air bersih yang dikelola oleh BUMDes. Dari jumlah tersebut, terdapat 125 pelanggan yang tercatat menunggak pembayaran iuran air bersih. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir 11,6% pelanggan tidak melaksanakan

kewajiban pembayaran tepat waktu. Informasi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun BUMDes telah memiliki basis pelanggan yang cukup besar dan berpotensi memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan layanan air desa, namun tingkat kepatuhan pembayaran masyarakat masih rendah.

Meskipun potensi pendapatan dari layanan air cukup besar, realisasinya masih belum memenuhi ekspektasi. Ini terlihat dari keberadaan tunggakan yang melibatkan 125 pelanggan, di mana sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi rumah tangga, kurangnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya sistem penagihan dan manajemen pelayanan oleh BUMDes. Keadaan ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar tagihan air masih berada pada tingkat yang rendah, sehingga diperlukan strategi yang tepat agar BUMDes dapat mengurangi tunggakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan layanan air bersih di desa. Rendahnya tingkat kepatuhan ini berpotensi menghambat kinerja BUMDes, baik dalam hal pemeliharaan jaringan pipa, penyediaan kualitas air bersih yang optimal, maupun dalam hal keberlanjutan layanan dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1 2
Statistik Pembayaran Air Bersih oleh Pelanggan BUMDes

Status Pembayaran Pelanggan	2020	2021	2022	2023	2024
Membayar tepat waktu	73,82%	64,31%	58,47%	42,15%	20,45%
Menunggak 1–2 bulan	15,71%	18,54%	20,26%	25,83%	33,72%
Menunggak lebih dari 3 bulan	6,47%	10,26%	13,84%	19,37%	44,29%
Tidak menggunakan layanan sementara (pemutusan sementara)	3,00%	6,89%	7,43%	12,65%	1,54%
Pengguna baru yang baru berlangganan	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber: Hasil observasi dan rekap administrasi BUMDes Desa Tukad Mungga Per 8 April 2025

Berdasarkan Tabel data 1.2 pengelolaan air bersih oleh BUMDes di Desa Tukad Mungga, dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan tren penurunan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar tagihan air. Pada tahun 2020, proporsi pelanggan yang rutin melakukan pembayaran tepat waktu mencapai sekitar 73,82%. Namun, angka ini mengalami penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya hingga hanya sekitar 20,45% pada tahun 2024. Sebaliknya, jumlah pelanggan yang menunggak pembayaran meningkat tajam dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2020 hanya sekitar 26,18% pelanggan yang memiliki tunggakan, maka pada tahun 2024 angka tersebut meningkat drastis hingga mencapai lebih dari 78,01%. Kondisi ini menunjukkan bahwa BUMDes menghadapi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan operasional layanan air bersih, karena sebagian besar pelanggan belum mampu atau belum memiliki kesadaran untuk melunasi kewajiban pembayaran air secara rutin.

Penurunan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar tagihan air bersih mencerminkan adanya beragam tantangan yang dihadapi BUMDes Desa Tukad Mungga dalam mengelola layanan air secara berkelanjutan. Menurut Putra dan Yuliani (2023), faktor utama yang menyebabkan meningkatnya tunggakan pembayaran air di tingkat desa meliputi keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pembayaran tepat waktu, serta lemahnya sistem penagihan dan pengawasan BUMDes. Ketiga faktor ini memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan layanan air bersih. Jika tidak segera diatasi, kondisi tersebut dapat mengganggu keberlanjutan operasional BUMDes dan menurunkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Data pada tabel statistik pembayaran air bersih oleh pelanggan BUMDes Desa Tukad Mungga tahun 2020-2024 juga menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan cenderung tidak membayar tagihan air tepat waktu, dengan alasan keterbatasan ekonomi dan kurangnya kesadaran terhadap kewajiban pembayaran. Kondisi ini terlihat dari data tahun 2020, di mana pelanggan yang membayar tepat waktu mencapai 73,82%, namun mengalami penurunan signifikan menjadi hanya 20,45% pada tahun 2024. Sebaliknya, jumlah pelanggan yang menunggak lebih dari tiga bulan meningkat tajam dari 6,47% pada tahun 2020 menjadi 44,29% pada tahun 2024. Fakta ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelanggan terhadap pembayaran air terus menurun setiap tahunnya. Dengan demikian, BUMDes menghadapi tantangan serius dalam menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan pelayanan air bersih di desa, karena tingginya tingkat tunggakan berpotensi menghambat kemampuan operasional dan pengembangan layanan.

Pengelolaan sumber daya oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di tingkat desa telah menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan memperbaiki kesejahteraan warga, terutama dengan berbagai tantangan yang terus berkembang dalam pelayanan publik. Saat ini, diharapkan UKM tidak hanya menjadi penyedia layanan tetapi juga berfungsi sebagai penggerak kemandirian ekonomi desa. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas UKM, termasuk dalam pengelolaan penyediaan air minum, menjadi isu penting yang memerlukan perhatian yang mendalam.

Dalam praktik pengelolaan usaha air desa di Desa Tukad Mungga, BUMDes menghadapi kendala berupa tunggakan pembayaran oleh pelanggan. Tunggakan ini tidak hanya memengaruhi stabilitas keuangan BUMDes, tetapi juga mengancam

keberlanjutan pelayanan air bersih bagi masyarakat. Permasalahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kemampuan ekonomi rumah tangga, sistem penagihan yang belum optimal, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembayaran tepat waktu. Oleh sebab itu, pengembangan strategi yang tepat untuk mengelola usaha air desa sangat diperlukan guna mengatasi masalah tunggakan, meningkatkan kepatuhan pelanggan, dan mempertahankan keberlangsungan layanan air bersih di desa. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan tunggakan pembayaran tagihan air di BUMDes.

1.2 Identifikasi Masalah

Sejalan dengan masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, pertanyaan yang akan dianalisis dapat dinyatakan sebagai berikut.

1. Masih tingginya tunggakan pembayaran air oleh pelanggan Terdapat sebagian masyarakat Desa Tukad Mungga yang belum membayar iuran air secara rutin, sehingga menghambat arus kas dan keberlanjutan operasional usaha air BUMDes.
2. Strategi penagihan pembayaran air belum berjalan secara optimal Mekanisme penagihan yang diterapkan BUMDes belum memiliki standar yang jelas, baik dari segi jadwal, sanksi, maupun pendekatan persuasif kepada pelanggan yang menunggak.
3. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha air desa Pengelola BUMDes masih memiliki keterbatasan kemampuan manajerial, administrasi, dan teknis, sehingga pengelolaan usaha air belum maksimal.

4. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan layanan air. Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya membayar air tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlangsungan layanan air desa.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya mengkaji mengenai pengaruh tingkat kesadaran masyarakat, kemampuan ekonomi pelanggan, dan efektivitas sistem pengelolaan BUMDes dalam membentuk tingginya angka tunggakan pembayaran air di Desa Tukad Mungga. Tujuan penelitian ini bukan untuk mengukur seberapa besar kontribusi masing-masing faktor, melainkan untuk mendalami bagaimana faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan memengaruhi perilaku pembayaran masyarakat melalui pendekatan kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memahami secara lebih mendalam pola dan dinamika yang menyebabkan masyarakat menunda pembayaran air, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif bagi BUMDes dalam merumuskan strategi penyelesaian tunggakan yang lebih efektif.

1.4 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang penelitian serta penentuan masalah, masalah yang akan diteliti dapat dinyatakan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah strategi pengelolaan usaha air di desa yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tukad Mungga?
2. Bagaimanakah Kendala yang dihadapi BUMDes di Desa Tukad Mungga dalam menjalankan Strategi Pengelolaan Usaha Air Desa?

3. Bagaimanakah Optimalisasi Strategi Pengelolaan Usaha air desa oleh BUMDes di Desa Tukad Mungga?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji.

1. Untuk menganalisis peran tingkat kesadaran masyarakat dalam mendorong kepatuhan pembayaran tagihan air di BUMDes Desa Tukad Mungga.
2. Untuk menganalisis peran dan strategi pengelolaan BUMDes Desa Tukad Mungga dalam meningkatkan ke patuhan pembayaran masyarakat terhadap layanan air desa.
3. Untuk mengidentifikasi cara dan strategi yang dilakukan masyarakat dalam mengatasi keterbatasan kemampuan finansial guna memenuhi kewajiban pembayaran air secara rutin.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berikut adalah penjelasan mengenai hasil yang diinginkan dari studi ini.

1. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi pengembangan penelitian terkait pengelolaan layanan publik di desa, terutama yang berhubungan dengan penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan menerapkan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi berbagai faktor sosial, ekonomi, dan administratif yang memengaruhi keinginan masyarakat untuk membayar tagihan air, dengan cara menganalisis pengalaman serta pandangan baik dari warga maupun pengelola BUMDes.

1.6.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Hasil dari kajian ini tidak hanya berperan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi, tetapi juga memberikan sumbangan terhadap pengembangan pengetahuan dan wawasan para peneliti tentang strategi pengelolaan sumber air di Bumdes di desa Tukad Mungga.

2) Bagi Keluarga

Hasil penelitian ini meningkatkan kesadaran keluarga akan peran mereka dalam mendukung kepatuhan pembayaran layanan air desa. Dengan memahami faktor seperti kondisi ekonomi, prioritas pengeluaran, dan manfaat penggunaan air bersih, keluarga dapat memberi dukungan yang tepat secara emosional, finansial, dan dalam pengelolaan anggaran. Kesadaran ini mendorong disiplin pembayaran, mencegah tunggakan, dan menjaga keberlanjutan layanan air bersih oleh BUMDes..

3) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan wawasan bagi mahasiswa mengenai dinamika pengelolaan layanan publik desa, khususnya permasalahan tunggakan pembayaran air. Melalui penelitian ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana dukungan keluarga, kondisi ekonomi rumah tangga, serta kemampuan manajerial BUMDes memengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar tagihan air.